

KEARIFAN LOKAL SUKU SASAK DAN SUKU BALI DI LOMBOK SEBAGAI UPAYA REKONSILIASI KONFLIK

SASAK TRIBE AND BALI TRIBE LOCAL WISDOM IN LOMBOK AS AN EFFORT TO CONFLICT RECONCILIATION

Jerry Indrawan
UPN “Veteran” Jakarta
jerry.indrawan@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat yang memiliki perbedaan etnis, agama, adat istiadat, dan kedaerahan senantiasa berpeluang untuk berhadapan dengan konflik. Konflik antar-masyarakat berimplikasi pada pola interaksi keseharian masyarakat, sebagaimana terlihat di masyarakat Lombok yang terdiri dari Muslim (Sasak) dan Bali (Hindu). Pola domisili yang tidak membaaur, melainkan mengelompok, menjadikan adanya segregasi sosial. Walaupun demikian, dalam suku Sasak dan suku Bali terdapat kearifan lokal tentang cara-cara rekonsiliasi jika terjadi konflik. Setiap masyarakat mempunyai potensi untuk menyelesaikan konflik di dalam budaya mereka sendiri. Daripada melibatkan pihak luar, metode resolusi konflik seperti ini terbukti lebih efektif. Tulisan ini akan menelaah bagaimana kearifan lokal masing-masing masyarakat, yaitu Sasak dan Bali, digunakan sebagai upaya rekonsiliasi konflik antar-keduanya di Lombok.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Suku Sasak, Suku Bali, Konflik, Rekonsiliasi

ABSTRACT

Communities that have differences in ethnicity, religion, customs, and regionalism always have the opportunity to deal with conflict. Inter-community conflict has implications for the pattern of everyday interactions, as seen in Lombok communities that consist of Muslims (Sasak) and Balinese (Hindu). Domicile patterns that group rather than blend create social segregation. Nevertheless, in the Sasak and Balinese tribes, there is local wisdom about ways of reconciliation in the event of a conflict. Every community has the potential to resolve conflicts within their own culture. Instead of involving outsiders, conflict resolution methods like this have proven to be more effective. This paper will examine how the local wisdom of each community, namely Sasak and Balinese, is used as an effort to reconcile the conflict between the two on Lombok.

Keywords: Local Wisdom, Sasak Tribe, Bali Tribe, Conflict, Reconciliation

Pendahuluan

Pulau Lombok adalah sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat dengan semacam “ekor” di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas pulau ini mencapai 5.435 km² sehingga menempatkannya pada peringkat 108 dari daftar pulau berdasarkan

luasnya di dunia. Pulau ini sendiri dibagi menjadi empat kabupaten dan satu kotamadya. Sedangkan, etnis yang mendiami pulau Lombok terdiri dari beberapa etnis diantaranya etnis sasak sebagai etnis mayoritas, etnis Samawa, dan etnis Mbajo sebagai etnis asli pulau Lombok. Sedangkan, yang lainnya seperti etnis Bali, Tionghoa (Cina), Timur Tengah (Arab) merupakan etnis minoritas yang adalah pendatang (Lukman, 2008: 33).

Etnis Bali merupakan etnis terbesar kedua setelah penduduk asli Sasak yang jumlahnya hampir 95%. Mereka lebih banyak bertempat tinggal di Lombok Barat, terutama di sekitar kota Mataram dan Cakra Negara. Masyarakat etnis Bali dan Sasak selain memiliki kedekatan secara geografis, juga memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Karena itu, keberadaan etnis Bali di pulau Lombok, lebih khusus lagi di Lombok Barat dan Mataram, tidak hanya dilihat sebagai etnis yang minoritas. Walaupun dalam kuantitas mereka sedikit, perjalanan sejarah pulau Lombok pernah diputar dan ditentukan oleh kekuatan dari suku Bali ini (Lukman, 2008: 33).

Selain karena secara geografis memang berdekatan, penguasaan kerajaan Bali di pulau Lombok membuat masyarakat Bali banyak yang tersebar di pulau Lombok. Jika kita mengacu pada penguasaan dan pengaruh, maka sejak abad XVII orang Bali berusaha menempatkan pulau Lombok di bawah kekuasaan dan pengaruhnya. Yang dimaksud di sini adalah kerajaan Karang Asem yang melakukan ekspansi dan menaklukkan seluruh pulau Lombok, kemudian kerajaan Karang Asem Bali membagi daerah kekuasaannya di pulau Lombok tersebut menjadi beberapa bagian atau kerajaan-kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pangesangan, Kerajaan Kediri, Kerajaan Sengkongo, Kerajaan Pagutan, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Singasari. Tujuan pembagian tersebut adalah untuk memberikan kedudukan kepada keluarga raja yang terdekat (Lukman, 2008: 36).

Menurut sejarah, orang Bali tinggal di Lombok bukan karena transmigrasi, melainkan datang karena perang antar-kerajaan pada zaman dahulu sekitar tahun 1700. Pada tahun 1960-an, etnis Bali di Lombok selalu diejek oleh umat lain ketika ada salah satu etnis Bali yang sedang melakukan persembahyangan *trisandya*. Ketika orang Bali membawa *sesajen* atau *bebantenan*, umat lain mengatakan bahwa Tuhan dalam Hindu suka makan. Biasanya semua etnis Bali telinganya dilubangi agar etnis

Bali yang lain saling mengetahui sesama etnis Bali. Tapi sekarang tidak diijinkan karena akan dianggap brandal dan susah kalau mencari pekerjaan. Etnis Bali juga biasanya dilarang memakai pakaian adat Bali ketika pergi ke sekolah (Lukman, 2008: 36-37).

Selain itu, setiap kepala keluarga etnis Bali yang tinggal di Lombok pasti memiliki keris dan tombak di rumahnya masing-masing. Mereka selalu siap tempur. Mereka berpendapat, haram hukumnya jika tidak membela diri karena membela diri adalah dibenarkan oleh hukum. Jadi zaman sekarang, kebenaran tidak cukup hanya dibicarakan. Tapi perlu dipraktikkan jika tidak jadi korban dan mati konyol. Seperti yang tersurat dalam kitab Canakya Nitisastra 4-15 bahwa ilmu pengetahuan yang tidak diterapkan dalam praktek kehidupan akan menjadi racun (Lukman, 2008: 37).

Jika etnis mayoritas Sasak di sana berkonflik dengan etnis Bali pasti ada alasan-alasan lain, seperti pola pemukiman masyarakat di Lombok yang sering terkotakkan atas dasar agama, organisasi keagamaan, suku atau partai politik yang menjadi pilihan masing-masing masyarakat. Pola keberagaman masyarakat Hindu dan Islam misalnya, adalah membentuk desa-desa atau gubuk-gubuk sendiri. Kondisi ini berimplikasi pada pola interaksi keseharian masyarakat Lombok Muslim dan non-Muslim. Sementara suku Bali (Hindu) yang berada di Pulau Lombok, mereka membentuk komunitas sendiri seperti yang ada di Sindu, Karang Medain, Karang Bedil Mataram dan Narmada, Lombok Barat.

Pola domisili yang tidak membaur, melainkan mengelompok, menjadikan adanya segregasi sosial. Hindu berkumpul dengan sesama Hindu, muslim pun demikian, diperparah dengan tidak ada komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Bara dalam sekam tampak dalam sikap sinis masing-masing pihak, contohnya seperti; orang Islam itu kedok, Hindu teman anjing, orang Lombok itu *lumbuk*, Bali *dateng kadu perang*, *ulik kadu*

perang. Segregasi sosial seperti ini mengakibatkan terjadinya konflik dalam skala masif. Persoalan sepele pun bisa bereskalasi menjadi konflik besar.

Tempat transaksi ekonomi pun memiliki identitas tersendiri. Untuk umat Hindu lebih banyak terkonsentrasi di pasar Sindu, Cakra Negara. Demikian juga tempat-tempat penguasaan ekonomi, juga dibedakan berdasarkan pada etnis tertentu. Di daerah Cakra Negara, yang merupakan pusat perekonomian di Mataram misalnya, semua lahan pertanian dibeli dan dijadikan toko dan *mall*, dan dikuasai oleh para imigran yang sebagian besar adalah etnis Tionghoa dan diidentikkan dengan umat Kristen. Sementara kecenderungan buruh kasarnya adalah masyarakat etnis Sasak. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kemiskinan dan kebodohan yang tak terselesaikan di masyarakat yang beretnis Sasak. Kondisi semacam ini membentuk daerah tersebut rentan terjadinya konflik horizontal.

Konflik yang sifatnya horizontal tersebut adalah yang paling sering terjadi di pulau Lombok, meskipun demikian, bukan berarti bahwa konflik horizontal tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan konflik vertikal. Bahkan, bisa dikatakan bahwa konflik horizontal bisa semakin parah atau justru mereda tergantung dari langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

Melihat sejarah Lombok membuat kita dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa daerah-daerah di Indonesia ragam budaya dan masyarakat yang lain daripada yang lain. Kompleksitas struktur sosial dan budaya bangsa ini membuat ciri khas tersendiri bagi Indonesia. Struktur masyarakat kita memungkinkan perbedaan-perbedaan yang ada

Sebagai contoh, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik. Pertama, secara horizontal hal itu ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama,

adat istiadat, dan kedaerahan. Masyarakat dengan perspektif perbedaan etnis, agama, adat istiadat, dan kedaerahan akan senantiasa melahirkan perbedaan kepentingan yang meruncing, serta dapat memancing terjadinya konflik. Secara horisontal juga, konflik ditandai oleh perbedaan di dalam lapisan yang sama, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Kedua, secara vertikal konflik biasanya ditandai oleh adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 1984: 30).

Permusuhan dan kekerasan terhadap sebuah kelompok etnis tidak pernah bersifat murni etnis. Perbedaan etnis, perbedaan budaya, dan perbedaan ras bisa menimbulkan kesulitan berkomunikasi, tetapi tidak dengan sendirinya menimbulkan dendam antar-etnis yang mendalam dan membawa pada kekerasan, hanya karena kedua kelompok etnis itu mempunyai ciri fisik yang berlainan, atau sifat-sifat budaya yang berbeda. Hubungan antar-etnis baru menimbulkan permusuhan dan kekerasan, jika perbedaan-perbedaan itu disertai dominasi etnis yang satu terhadap etnis lainnya, yang terjadi di berbagai bidang.

Hubungan dominasi disertai kekerasan yang bersifat struktural karena ditandai oleh keunggulan yang dominan pada yang satu dan ketergantungan yang relatif besar pada pihak lainnya. Jika dominasi ini menimbulkan perbedaan besar pada penguasaan ekonomi, cepat atau lambat akan muncul perlawanan dari pihak yang mengalami ketidakadilan pembagian sumber daya. Lalu, menyusul kemudian konflik antara pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai, di mana konflik ini kalau mengalami eskalasi akan berkembang menjadi kekerasan (Kleden, 1999: 126).

Konflik sosial yang terjadi selama ini antara masyarakat yang saling berdekatan antara tempat tinggal etnis Bali dan masyarakat Sasak lebih mengarah pada adanya sentimen agama masing-masing yang tidak melibatkan masyarakat kedua belah pihak pada umumnya, kecuali dalam lokalitas yang kecil. Hal ini

membuat konflik tersebut hanya berupa gaung dari luar bahwa terdapat konflik etnis di Pulau Lombok.

Penulis merasa perlu mengangkat isu kearifan lokal karena kajian ini berangkat dari konsep dan cara berpikir asli sebuah daerah di Indonesia. Daripada menggunakan konsep asing, lebih baik memanfaatkan secara optimal konsep lokal untuk dikembangkan sebagai salah satu sarana rekonsiliasi konflik. Atas dasar itulah, tulisan ini akan melihat bagaimana kearifan lokal masing-masing masyarakat, yaitu Sasak dan Bali, digunakan sebagai upaya rekonsiliasi konflik antar keduanya di Lombok

Tinjauan Pustaka

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori rekonsiliasi. Rekonsiliasi sering kali dicantumkan sebagai sasaran dalam proses perdamaian nasional. Oxford English Dictionary (1989: 352-353), mendefinisikan “*reconcile*” sebagai “*to bring (a person) again into friendly relation relations ... after an estrangement ... to bring back into accord, to reunite (person or things) in harmony* [Berbaik kembali dengan seseorang ... setelah masa-masa keterasingan ... mengakurkan kembali, menyatukan kembali (orang atau barang) ke kondisi harmonis].

Dalam konteks politik atau kekerasan politik, rekonsiliasi dijabarkan sebagai “mengembangkan saling penerimaan yang bersifat damai antara orang-orang atau kelompok yang bermusuhan atau dahulunya bermusuhan”. Sering kali muncul anggapan bahwa mengetahui kebenaran tentang masa lalu merupakan syarat mutlak demi terjadinya rekonsiliasi (Hayner, 2005: 264).

Menurut beberapa penulis dari Afrika Selatan, rekonsiliasi adalah menghadapi kebenaran yang menyakitkan untuk menghormoniskan pandangan-pandangan yang tidak berimbang sehingga konflik-konflik dan perbedaan yang masih akan terjadi paling tidak berada dalam satu lingkup pemahaman. Rekonsiliasi dalam artian secara luas, adalah

“tutup buku” tentang masa lalu. Satu elemen penting dalam proses ini adalah penghentian siklus menuduh-membantah-balas menuduh yang memecah belah. Rekonsiliasi terjadi bukan dengan melupakannya, namun dengan menyelesaikannya melalui proses evaluasi (Asmal et al., 1996: 46).

Rekonsiliasi memiliki beberapa area cakupan sebagai sebuah disiplin ilmu, khususnya dalam bidang resolusi konflik. Beberapa ahli telah menyusun setidaknya lima kategori rekonsiliasi. Kategori pertama, berdasarkan teori-teori dan model-model, seperti pilihan rasional atau *game theory*, teori kebutuhan manusia, sosial emosional vs model-model instrumental, dan model pengampunan (Muluk, 2009: 109-110).

Kategori kedua, berdasarkan ruang lingkup rekonsiliasi, mengacu pada bidang hubungan antarmanusia, seperti identitas, sikap, kepercayaan, dan perilaku. Kategori ketiga, berhubungan dengan komponen-komponen rekonsiliasi yang terkait dengan kebutuhan sosial dari pihak-pihak yang terlibat, seperti keadilan, kebenaran, penyembuhan, dan keamanan. Kategori keempat, rekonsiliasi bisa diklasifikasikan menurut tingkatan dari intervensi yang digunakan, apakah dalam tingkat antarpersonal, komunitas, atau level nasional. Dan kategori terakhir adalah berdasarkan “pendekatan politis” yang digunakan dalam proses rekonsiliasi, apakah sifatnya pendekatan pola *bottom-up* atau *top-down*, atau juga keduanya (Muluk, 2009: 109-110).

Rekonsiliasi memiliki implikasi membangun atau membangun kembali hubungan yang tidak lagi dihantui konflik dan kebencian masa lalu. Namun, bagaimana mengukur kemajuan rekonsiliasi? Jika ada proses rekonsiliasi yang sedang berjalan, atau suatu masyarakat sudah mulai mencapai rekonsiliasi, apa tanda-tandanya? Singkatnya, bagaimana rupa rekonsiliasi? Untuk melihat proses rekonsiliasi yang terjadi diantara masyarakat yang bertikai, dengan

menggunakan teori rekonsiliasi, menurut Priscilla Hayner untuk mengukur apakah rekonsiliasi sudah atau mulai berakar, ia menyarankan tiga pertanyaan (Hayner, 1999: 363-364).

Pertanyaan pertama, bagaimana masa lalu disikapi di lingkup publik? Apakah ada rasa pahit tentang masa lalu dalam hubungan politik atau publik lainnya? Apakah konflik atau pelanggaran di masa lalu diproses atau diserap sedemikian rupa sehingga orang bisa membicarakannya (bila tidak mudah, paling tidak secara sopan, bahkan dengan mantan lawan?

Pertanyaan kedua, apakah ada banyak versi tentang masa lalu? Melakukan perdamaian atau rekonsiliasi tidak semata-mata mengembalikan hubungan baik, namun juga mendamaikan fakta-fakta atau kisah-kisah yang bertentangan, membuat fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan yang bertentangan menjadi konsisten, bersesuaian atau kompatibel satu sama lain.

Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan antara pihak-pihak yang dahulunya bertikai? Terutama, apakah hubungan masih didasarkan pada masa lalu? Referensi terus-menerus pada masa lalu mungkin menandakan permusuhan. Terdapat banyak contoh ingatan yang pahit yang justru bisa mendorong kekerasan baru atau sengaja digunakan para pemimpin untuk menimbulkan ketegangan antar komunitas. Hubungan yang baru terbentuk antara pihak-pihak yang semula bermusuhan bisa bergantung pada kepentingan atau tantangan baru yang berpengaruh pada semuanya. Pengikat-pengikat ini bisa berupa proyek pembangunan atau rekonstruksi ekonomi, ikatan keluarga atau komunitas, bahkan perang dengan musuh lain. Contoh, Perang Malvinas untuk sementara menyatukan warga Argentina untuk mendukung angkatan bersenjata, meskipun selama bertahun-tahun menjadi penindas.

Jika pertanyaan-pertanyaan di atas membantu mengidentifikasi apakah

rekonsiliasi terjadi, lalu apa faktor atau elemen spesifik yang bisa memberikan sumbangannya pada perkembangannya? Pertanyaan ini sebaiknya dipertimbangkan dari sudut pandang para korban, karena para pelaku cenderung menganggap bahwa rekonsiliasi telah tercapai, sementara tidak demikian dengan para korban. Priscilla Hayner juga menyarankan lima elemen sebagai elemen pendukung, yang perlu untuk membuat rekonsiliasi berakar (Hayner, 2005: 279).

Pertama, penghentian kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebuah transisi ke perdamaian memiliki arti bahwa konflik terbuka sudah berakhir, namun tidak berarti bahwa semua kekerasan politik atau ancaman kekerasan sudah berakhir. Bila ancaman demikian berlanjut, rekonsiliasi bisa tidak berakar.

Kedua, pengakuan dan pemberian pemulihan. Pengakuan resmi terhadap fakta-fakta masa lalu bisa memiliki peran krusial dalam proses penyembuhan masyarakat.

Ketiga, pengikat masyarakat. Dalam banyak kondisi, sebaiknya didorong proyek yang menyatukan kelompok-kelompok yang tadinya bertikai untuk mendapatkan keuntungan bersama, seperti program pembangunan atau rekonstruksi. Tingkat kontak yang terjadi antara pihak-pihak tersebut akan menentukan apakah terjadi rekonsiliasi. Untuk mendorong rekonsiliasi perlu dijawab pertanyaan tentang bagaimana membangun atau membangun kembali ikatan tersebut (Hayner, 2005: 280-281).

Terakhir, keempat, menyelesaikan ketidaksetaraan struktural dan kebutuhan material. Di mana terjadi ketidaksetaraan yang parah akibat penindasan di masa lalu, rekonsiliasi tidak bisa dijadikan sekedar proses psikologis atau emosional. Rekonsiliasi membutuhkan komitmen, terutama dari mereka yang pernah diuntungkan dan terus diuntungkan oleh diskriminasi di masa lalu, untuk menyikapi ketidaksetaraan yang tidak

adil dan kemiskinan yang merendahkan martabat kemanusiaan (Hayner, 2005: 282).

Terakhir, adalah waktu. Rekonsiliasi jarang terjadi dengan segera, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Pada akhirnya, rekonsiliasi di tingkat masyarakat akan bergantung pada faktor-faktor dan dinamika-dinamika yang tidak selalu bisa diramalkan atau dikendalikan. Salah satu cara melakukan proses rekonsiliasi adalah dengan membawa para pelaku dan korban dalam mendengar pendapat. Melalui kesaksian korban dan pengakuan pelaku, kemungkinan penyembuhan dan perubahan diri tentang pengalaman yang sudah terjadi bisa membawa pada proses rekonsiliasi yang efektif (Teitel, 2004: 183).

Proses Kearifan Lokal pada suku Sasak

Nilai kearifan lokal suku Sasak merupakan objek non-materiil yang sulit diukur dengan tolak ukur yang bersifat materiil. Namun, sesungguhnya nilai kearifan lokal itu dapat dirasakan sebagai pemandu setiap orang secara naluriiah, intuitif, dan akurat kepada kebajikan. Dengan demikian, maka nilai-nilai kearifan lokal akan meningkatkan kualitas seseorang apabila diamalkan dan ditegakkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asmara & Maladi, 2010: 11).

Sehubungan dengan penyelesaian konflik, pada masyarakat suku Sasak dikenal adanya prinsip-prinsip pokok penyelesaian sengketa, sebab dalam masyarakat hukum adat Sasak tidak menghendaki adanya putusan kalah menang dalam penyelesaian suatu sengketa. Sengketa yang terjadi harus diarahkan kepada perdamaian yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dalam upaya penyelesaian itu, kedua pihak bisa saling menjaga perasaan masing-masing (*tao saling undur pasang*) (Asmara & Maladi, 2010: 1).

Pada masyarakat suku Sasak, penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar pengadilan formal dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, maupun juga melalui mediasi. Mereka juga melibatkan pihak ketiga,

seperti Tuan Guru, tokoh agama, pemuka adat, dan kepala desa. Dalam masyarakat adat Sasak, tata cara penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara:

1. Pertama-tama, para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara negosiasi.
2. Jika cara negosiasi ini tidak bisa menghasilkan kesepakatan bagi para pihak, maka pihak yang dirugikan melaporkan perselisihannya tersebut kepada kepala dusun atau kepala adat atau pemuka agama.
3. Selanjutnya, kepala adat atau pemuka agama tersebut memanggil para pihak atau keluarga dekat dan tetua-tetua adat untuk menyaksikan proses musyawarah tersebut.
4. Dalam musyawarah tersebut, yang bertindak selaku penengah adalah pemerintah (pemerintah desa atau kecamatan), pemuka agama (kyai, tuantuan guru), atau tokoh adat/pemangku adat/pengemban adat yang bijaksana.
5. Keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah mufakat yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
6. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut dibuat secara tertulis berupa akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan penengah (Asmara & Maladi, 2010: 9).

Suku Sasak juga mengenal lembaga bernama "*krama*" sebagai institusi yang terkait kearifan lokal. *Krama* adalah sebuah institusi adat yang memayungi kearifan lokal. Terdiri dari dua macam, *krama* sebagai lembaga adat dan *krama* sebagai aturan pergaulan sosial. Penerapan institusi adat *krama* dalam kehidupan etnis Sasak memiliki tujuan untuk ikut mendorong lahirnya berbagai bentuk kearifan lokal dalam komunitas tersebut, yang mengandung nilai-nilai yang masih cocok dengan kehidupan kekinian, dan relevan digunakan sebagai metode pencegahan konflik. Ada tiga kategori bentuk kearifan lokal masyarakat Sasak Lombok, yaitu:

1. Bidang politik, sosial, kemasyarakatan, tercermin dari sepuluh macam saling sebagai pengikat tali silaturahmi masyarakat Sasak, yaitu saling *jot/perasak* (saling memberi atau mengantarkan makanan), *pesilaq* (saling undang untuk suatu hajatan keluarga), saling *pelangarin* (saling layat jika ada kerabat/sahabat yang meninggal), *ayoin* (saling mengunjungi), dan saling *ajinan* (saling menghormati atau saling menghargai terhadap perbedaan, menghargai adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu), saling *jangoq* (silaturahmi saling menjenguk jika ada di antara sahabat sedang mendapat atau mengalami musibah), saling *bait* (saling ambil-ambilan dalam adat perkawinan), *wales/bales* (saling balas silaturahmi, kunjungan atau semu budi (kebaikan) yang pernah terjadi karena kedekatan-persahabatan), saling *tembung/sapak* (saling tegur sapa jika bertemu atau bertatap muka antarseorang dengan orang lain dengan tidak membedakan suku atau agama) dan saling *sadug* (saling mempercayai dalam pergaulan dan persahabatan, terutama membangun peranakan Sasak Jati (persaudaraan Sasak sejati) di antara sesama sanak (saudara) Sasak dan antar orang Sasak dengan *batur luah* (non Sasak), dan *saling ilingan/peringet*, yaitu saling mengingatkan satu sama lain antara seseorang (kerabat/ sahabat) dengan tulus hati demi kebaikan dalam menjamin persaudaraan atau silaturahmi.
 2. Bidang ekonomi perdagangan, tercermin dari tiga praktik kearifan lokal (tiga saling) yaitu: saling *peliwat* (suatu bentuk menolong seseorang yang sedang pailit atau jatuh rugi dalam usaha dagangannya), *saling liliq/gentik* (suatu bentuk menolong kawan dengan membantu membayar hutang tanggungan sahabat atau kawan, dengan tidak memberatkannya dalam bentuk bunga atau ikatan lainnya yang mengikat), dan saling *sangkal/sangkol/sangkon* (saling menolong dengan memberikan bantuan material terhadap kawan yang sedang menerima musibah dalam usaha perdagangan).
 3. Bidang adat budaya, tercermin dari saling *tulung* (bentuk tolong menolong dalam membajak sawah ladang para petani), saling *sero* (saling tolong dalam menanam sawah ladang), *saur alap* (saling tolong dalam mengolah sawah ladang, seperti dalam hal *ngekiskis*/membersihkan rerumputan dengan alat potong kikis atau *ngoma/ngome*/mencabuti rumput, dan *besesiru/besiru* yaitu nilai kearifan lokal ini juga hampir sama dengan *saur alap*, yaitu pekerjaan gotong royong bekerja di sawah dari menanam bibit sampai panen (Asmara & Maladi, 2010: 9-10).
- Berdasarkan uraian di atas, terdapat sepuluh unsur atau komponen nilai demokrasi yang tercermin dalam kearifan lokal masyarakat Sasak, yaitu demokrasi berketuhanan, toleransi, kerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, memahami dan menerima kultur dalam masyarakat, berpikir kritis dan sistematis, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif, sensitif terhadap kesulitan orang lain, kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Transformasi nilai tersebut membuat hidup bermasyarakat akan tetap harmonis, apabila lembaga adat ditopang *awig-awig* adat secara arif dapat dihidupkan, dirancang kembali, disesuaikan kebutuhan dan tuntutan masa kini.

Proses Kearifan Lokal pada Suku Bali

Masyarakat Bali sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, agama memiliki nilai kearifan lokal yang telah teruji dan terbukti daya jelajah sosialnya dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan sosial. Nilai kearifan lokal yang berkembang dan diyakini

sebagai perekat sosial yang kerap menjadi acuan dalam menata hubungan dan kerukunan antar sesama umat beragama di Provinsi Bali, di antaranya: nilai kearifan *Tri Hita Karana*; suatu nilai kosmopolit tentang harmonisasi hubungan manusia dengan tuhan (*sutata parhyangan*), hubungan manusia dengan sesama umat manusia (*sutata pawongan*) dan harmonisasi hubungan manusia dengan alam lingkungannya (*sutata palemahan*). Nilai kearifan lokal ini telah mampu menjaga dan menata pola hubungan sosial masyarakat yang berjalan sangat dinamis dan tidak terjadi konflik antarsuku (Lukman, 2008: 41).

Nilai kearifan lokal *tri kaya parisuda*, sebagai wujud keseimbangan dalam membangun karakter dan jati diri insani, dengan menyatukan unsur pikiran, perkataan dan perbuatan. Tertanamnya nilai kearifan ini telah melahirkan insan yang berkarakter, memiliki konsistensi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajiban sosial. Nilai kearifan lokal *Tatwam Asi*, “kamu adalah aku dan aku adalah kamu”, nilai ini memberikan fibrasi bagi sikap dan perilaku mengakui eksistensi seraya menghormati orang lain sebagaimana menghormati diri sendiri. Nilai ini menjadi dasar yang bijaksana dalam membangun peradaban demokrasi modern yang saat ini sedang digalakkan (Lukman, 2008: 41).

Nilai *Salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya*, suatu nilai sosial tentang perlunya kebersamaan dan kerjasama yang setara antara satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan sosial yang saling menghargai dan menghormati. Nilai *Bhineka Tunggal Ika* sebagai sikap sosial yang menyadari akan kebersamaan ditengah perbedaan, dan perbedaan dalam kebersamaan. Semangat ini sangat penting untuk diaktualisasikan dalam tantangan kehidupan sosial yang multikultural. Nilai kearifan lokal *menyama braya*, mengandung makna persamaan dan persaudaraan dan pengakuan sosial bahwa kita adalah bersaudara. Sebagai satu kesatuan sosial persaudaraan maka sikap dan perilaku dalam

memandang orang lain sebagai saudara yang patut diajak bersama dalam suka dan duka (Lukman, 2008: 41).

Sederetan nilai-nilai kearifan lokal tersebut akan bermakna bagi kehidupan sosial apabila dapat menjadi rujukan dan bahan acuan dalam menjaga dan menciptakan relasi sosial yang harmonis. Sistem pengetahuan lokal ini seharusnya dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan yang dinamis dan berkembang terus secara kontekstual sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin heterogen dan kompleks (Lukman, 2008: 41-42).

Proses Rekonsiliasi antara Suku Sasak dan Suku Bali

Hubungan manusia dengan sesama umat manusia (*sutata pawongan*) dalam adat Bali adalah peluang sekaligus tantangan bagi orang Bali secara khusus dalam menerapkan sebuah pola hubungan yang harmonis dengan orang Sasak. Sedangkan, *krama* sebagai lembaga adat dan *krama* sebagai aturan pergaulan sosial juga menawarkan suku Sasak pilihan yang sama untuk hidup bersama dalam sebuah masyarakat pluralis. Penerapan *krama* dalam kehidupan etnis Sasak telah ikut mendorong lahirnya berbagai bentuk kearifan lokal yang masih cocok dengan kehidupan kekinian, sehingga muncul sepuluh unsur atau komponen nilai demokrasi yang tercermin dalam kearifan lokal masyarakat Sasak. Beberapa di antaranya adalah, toleransi, kerja sama dengan orang lain, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan (Lukman, 2008: 43).

Dua contoh pada masing-masing suku di atas membuktikan bahwa kearifan sebenarnya adalah peluang sekaligus tantangan bagi mereka. Peluang untuk hidup harmonis tercantum dengan sangat jelas dalam adat mereka. Begitu pula tantangannya, karena mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari pastilah sulit. Ketika faktor-faktor non-teknis, seperti masalah kemiskinan contohnya, menghalangi, maka kondisi ini menjadi

tantangan bersama bagi mereka dalam mengaplikasikan proses kearifan lokal tersebut (Lukman, 2008: 43).

Dalam penelitian I Wayan Suwindia yang mengambil lokasi di tiga desa, Pemogan (Denpasar), Budakeling (Karangasem) dan Pegayaman (Singaraja), terungkap adanya faktor-faktor lain yang membuat hubungan Islam-Hindu selalu erat. Salah satu faktor itu adalah tingkat pendidikan. Semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat Bali membuat hubungan pemeluk Hindu dan Islam menjadi semakin baik. Berikutnya adalah faktor historis. Sejak di masa lalu, ketika Bali masih berbentuk kerajaan, pendatang beragama Islam tidak sekedar diterima dengan tangan terbuka, melainkan juga dilindungi. Oleh raja-raja di Bali, bahkan para pendatang diberi hibah tanah untuk ditempati dan diolah (Lukman, 2008: 43-44).

Hasil penelitian ini bisa kita bawa di Lombok, di mana suku Sasak mayoritas adalah orang muslim. Ketika seorang individu mencapai tingkatan intelektual tertentu dalam hidupnya, di mana toleransi menjadi tolak ukur tingkat peradaban bangsanya, tidak akan terlihat lagi darinya upaya-upaya penyelesaian konflik lewat jalur kekerasan. Logika, akal sehat, dan hati nurani dikedepankan, sehingga proses menghindari konflik (apalagi hanya karena masalah sepele) menjadi opsi utama baginya. Untuk itu, tantangan juga bagi pemerintah daerah untuk bagaimana mengembangkan kualitas pendidikan yang merata di Lombok, sehingga keluarannya nanti dapat berperan sebagai agen-agen pencegah konflik di masyarakat Lombok itu sendiri. Jadi, penggalian kembali kearifan lokal memang dapat menjadi salah satu upaya merekonsiliasi konflik horizontal.

Asalkan jangan sampai terjadi sebuah kondisi saat kohesi sosial merosot dan kontrol sosial hancur. Ditambah dengan tidak berfungsinya kinerja aparat penegak hukum dan sistem peradilan, membuat kekerasan dapat berkembang ke level yang lebih besar lagi. Di

tengah-tengah kondisi seperti ini, masyarakat lokal akan terputus dari proses pembentukan budaya perdamaian (Wesselss, 2009: 349).

Bicara bagaimana rekonsiliasi antara Suku Sasak dengan Suku Bali, berarti kita bicara bagaimana proses rekonsiliasinya dilakukan. Secara umum, proses rekonsiliasi terkait beberapa upaya berikut ini, antara lain: memperkuat infrastruktur sosial masyarakat, pembagian sumber daya yang adil agar tercipta hubungan yang harmonis antar masyarakat, dan peningkatan peran pemerintah (pemda terutama) untuk membangun ikatan-ikatan persaudaraan antar suku yang berbeda di satu wilayah. Dari kesemuanya, yang paling penting adalah bagaimana praktik-praktik kearifan lokal menjadi bagian yang penting dalam proses rekonsiliasi di suatu masyarakat, walaupun tetap digunakan pendekatan-pendekatan ala barat di sana.

Kearifan lokal memungkinkan masyarakat untuk membangun kisah-kisah bermakna baru, meninggalkan kisah-kisah usang tentang konflik masa lalu, sehingga nilai-nilai perdamaian pun terkandung di dalamnya. Melalui praktek kearifan lokal, masyarakat mengekspresikan harapan, sebagaimana juga penderitaan mereka. Kondisi ini adalah jalan bagi terciptanya identitas kolektif masyarakat yang mampu mengembangkan sikap persatuan, harmoni, dan perdamaian tentunya (Kleden, 1999: 128).

Selain itu, proses menuju rekonsiliasi yang ideal juga tidak bisa dipecahkan secara etnis semata, misalnya melalui pembauran. Kita tahu dari segi pemukiman pun orang Bali tidak berada dalam satu wilayah yang sama dengan Sasak. Pembaruan tidak efektif dalam hal ini karena hanya bertujuan menciptakan integrasi antar etnis, padahal masalah utamanya disebabkan tidak adanya integrasi secara ekonomi. Integrasi ini akan tercipta jika suku Sasak mendapat kesempatan usaha yang sama dan mendapat bantuan yang diperlukan untuk mengimbangi kurangnya pengalaman mereka dalam bidang perdagangan. Tentunya, upaya

ini akan berhasil dengan baik jika ada peraturan daerah yang adil dan mengakomodasi kepentingan semua, agar kelompok etnis yang kuat dalam bidang ekonomi juga bersedia memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat etnis lain, tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata (Kleden, 1999: 129).

Konsepsi barat tentang rekonsiliasi, yang menekankan akan pentingnya meningkatkan hubungan sosial di antara masyarakat, ternyata sangat terbatas dan tergantung konteks. Sebuah kasus di Angola menunjukkan bahwa rekonsiliasi adalah sebuah konstruksi sosial, di mana pembentukannya dilakukan melalui konsepsi-konsepsi lokal. Bagi banyak masyarakat pedesaan di Angola, konsepsi sosial dan spiritual terhubung sangat erat, apalagi segi spiritualnya. Di sana, upaya rekonsiliasi sangat mengedepankan pendekatan yang sifatnya spiritual, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui konsepsi dan makna-makna lokal Angola (Wesselss, 2009: 351-352).

Begitu pula di Lombok, konsepsi-konsepsi adat Sasak dan Bali harus diutamakan dalam upaya-upaya pencegahan, maupun rekonsiliasi sebuah konflik. Di bagian proses kearifan lokal yang sudah dijelaskan di awal, disebutkan beberapa metode kearifan lokal dari Sasak dan Bali yang bisa digunakan. Sesungguhnya, terbuka pada metode-metode rekonsiliasi yang mengedepankan budaya atau cara lokal dapat memainkan peranan penting dalam pembentukan budaya damai di dunia yang sangat beragam ini.

Contohnya, proses rekonsiliasi yang terjadi di antara masyarakat yang bertikai di Lombok dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui program keserasian sosial, yang diusulkan oleh Pemkot Mataram. Ketika penulis mengunjungi Pemkot Mataram, disampaikan bahwa ada sepuluh lokasi rawan konflik, seperti di Kelurahan Pagutan, Pagutan Timur, Taliwang, Selagalas, dan Jempong Baru, akan diusulkan mendapat dana program keserasian sosial dari Kementerian Sosial. Dana

ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Masyarakat yang memperoleh bantuan dana akan didampingi oleh tenaga pendamping yang direkrut dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh pemuda dari lokasi rawan konflik. Pemkot berharap dengan adanya program tersebut, kondusifitas Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB bisa terjaga sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. Program keserasian sosial sendiri adalah program Kementerian Sosial untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat seperti tawuran warga, pertikaian antar kelompok masyarakat yang terjadi karena kesenjangan maupun kecurigaan. Bantuan yang diberikan untuk daerah rawan konflik, selain melatih agen perdamaian juga untuk menggelar dialog antar warga sehingga terwujud kehidupan sosial yang terintegrasi.

Cara lainnya adalah melalui penggunaan kearifan lokal dalam upaya-upaya penyelesaian konflik. Kali ini yang berperan adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memperkuat peran lembaga adat (krama adat) untuk mencegah konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran akan nilai-nilai luhur bangsa akan mencegah timbulkan berbagai konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di wilayah NTB yang sarat konflik sosial. Kegiatan lainnya untuk mengimplementasikan program pengembangan wawasan kebangsaan itu yakni dialog antar umat beragama, pemantapan ketahanan bangsa dan dialog interaktif peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama di NTB.

Kearifan lokal yang dilembagakan melalui institusi formal membutuhkan kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut yakni memelihara dan mengembangkan hubungan antarlembaga, kerukunan sosial antar dan inter etnis, suku dan kelompok masyarakat lainnya sebagai potensi bangsa. Selain itu, adanya kebijakan

mengembangkan sistem identifikasi, pengkajian, analisis situasi dan kondisi konflik serta kerawanan sosial keamanan di daerah. Kebijakan lainnya, yakni meningkatkan peran dan fungsi serta peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan keutuhan masyarakat, dan membangun kebersamaan dan kemitraan dengan komponen masyarakat untuk menciptakan sinergi.

Tanpa peran pemerintah, bisa pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sampai pemerintah pusat, maka kearifan lokal yang ada hanyalah sebatas instrumen budaya. Sebuah tradisi yang dilanggengkan terus-menerus, namun tidak memiliki dampak yang kuat di era modern seperti ini. Penulis berpendapat bahwa kearifan lokal memang menjadi kunci bagi upaya rekonsiliasi konflik di Lombok, bahkan di daerah mana pun di Indonesia, namun peran yuridis negara sebagai “hakim” yang melegalkan instrumen kearifan lokal tersebut.

Terakhir, proses rekonsiliasi yang ideal menurut Bar-Tal adalah memulai proses rekonsiliasi ketika pihak-pihak yang berkonflik mulai untuk merubah keyakinan, sikap, tujuan, motivasi, dan emosinya terhadap konflik tersebut, dan juga bagaimana hubungan di masa depan antara kedua pihak yang bertikai itu. Agar proses rekonsiliasinya efektif, harus dilakukan secara *top down* dan *bottom up* secara bersamaan. Bar-Tal juga mengatakan bahwa kepercayaan akan sebuah tujuan bersama di suatu masyarakat, yang mendasari timbulnya sebuah konflik, harus dirubah. Sekarang, masyarakat harus mampu mengkompromikan tujuan bersama yang berguna bagi semua pihak, yang akan membawa pada hubungan baik antar sesama anggota masyarakat (Bar-Tal, 2009: 371).

Selain itu, perubahan psikologis dari seorang pemimpin sangat mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, pemimpin menjadi elemen yang sangat penting dalam proses rekonsiliasi karena pemimpinlah yang menginisiasi terjadinya negosiasi untuk mencapai resolusi damai. Pemimpin juga dalam

posisi terdepan untuk memimpin proses rekonsiliasi, khususnya apabila di antara mereka memiliki komitmen besar terhadap proses tersebut dan memelihara hubungan baik antar sesama pemimpin. Pemimpin memiliki peran penting untuk memulai dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi, agar dipatuhi oleh semua masyarakat yang dipimpinnya (Bar-Tal, 2009: 369).

Pemimpin adat atau pemimpin politik sama-sama penting. Di sinilah letak sinergi yang positif antara kearifan lokal dengan otoritas pemerintah dengan aspek yuridisnya. Kombinasi keduanya akan membawa proses rekonsiliasi berjalan lebih baik, serta diterima oleh semua pihak. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pun adil dan menguntungkan semua pihak, dan jangan lupa kebijakannya pun implementatif karena pemimpin politik memiliki kewenangan untuk mewujudkannya. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Hamdi Muluk di atas, bahwa rekonsiliasi dalam konteks pendekatan politis membutuhkan pendekatan pola *bottom-up* atau *top-down*, atau juga keduanya. Proses ini bisa dilakukan oleh para pemimpin tersebut.

Kesimpulan

Perbedaan yang terjadi dalam sebuah masyarakat dengan perbedaan etnis, agama, adat istiadat, dan kedaerahan memang dapat berujung pada terjadinya sebuah konflik. Begitu pula dengan apa yang terjadi di antara etnis Sasak dan Bali di Lombok.

Di Lombok, keberagaman masyarakat Hindu dan Islam ditunjukkan dari terpisahnya desa-desa atau gubuk-gubuk mereka. Pemisahan pemukiman dan pola domisili yang tidak berbaur ini berdampak pada interaksi antar-masyarakat di sana. Segeregasi sosial terjadi karena absennya komunikasi yang positif antar-mereka.

Dalam nilai kearifan lokal suku Sasak, tidak dikenal istilah putusan kalah atau menang

dalam penyelesaian suatu sengketa. Sengketa yang terjadi harus diarahkan kepada perdamaian yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Masyarakat Bali pun sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, dan agama, memiliki nilai kearifan lokal yang mampu menjaga dan menata pola hubungan sosial masyarakat yang berjalan sangat dinamis dan tidak terjadi konflik antar suku.

Rekonsiliasi di Lombok dalam dilakukan lewat bantuan pemerintah daerah, tentunya dengan bersandar pada nilai-nilai kearifan lokal. Peran pemerintah daerah adalah dengan memperkuat peran lembaga adat (*krama*) untuk mencegah konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam tulisan ini, penulis juga menyarankan bahwa upaya rekonsiliasi harus dimulai dari bawah, melalui masyarakat sipil atau gerakan akar rumput. Gerakan ini tentunya melalui pendekatan yang diinisiasi dari atas, seperti melalui aktor-aktor negara yang didukung basis hukum dan kerangka politik yang formal.

Terkait contoh kasus konflik antara suku Sasak dan suku Bali penulis merasa bahwa upaya rekonsiliasi harus di mulai dari *grassroot* atau kalangan akar rumput. Pihak-pihak yang bertikai, dibantu masyarakat Lombok lainnya, harus mau menginisiasi terjadinya proses

rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi sebaiknya di mulai melalui kesepakatan dan kesepahaman bersama. Jika hal ini dilakukan, maka proses resolusi konflik akan berjalan lebih mudah karena opsi perdamaiannya berasal dari masing-masing suku. Peran pemerintah adalah membantu menjaga proses ini agar tetap dikedepankan dalam rangka menjaga perdamaian antarsuku.

Sebagai penutup, konflik antarsuku Indonesia bukanlah masalah kesukuan semata, tetapi lebih menyangkut hubungan kekuatan ekonomi politik. orang atau kelompok yang mempunyai kekuatan politik bisa mempertukarkan kekuatan politiknya dengan keuntungan ekonomi. Sebaliknya, pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi dapat mempertukarkan kekuatannya untuk mendapatkan perlindungan dan kemudahan politik. kerjasama di kalangan kelompok-kelompok dominan ini jelas menguntungkan mereka. Memang selain kearifan lokal, dibutuhkan kematangan berdemokrasi bagi orang Indonesia untuk benar-benar dapat mengurangi konflik di negeri tercinta ini. Kematangan di mana penilaian atas individu bukan lagi didasarkan atas tampak fisik semata, tetapi di mana perbedaan dijunjung tinggi sebagai alat pemersatu bangsa

Daftar Pustaka

- Asmal, K., & Asmal, L. (1996). *Reconciliation through truth: A reckoning of apartheid's criminal governance*. Cape Town, South Africa: David Philip.
- Asmara, G., & Maladi, Y. (2010). Penyelesaian konflik pertanahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, 22(1), 1-17. <https://doi.org/10.22146/jmh.16215>
- Bar-Tal, D. (2009). Reconciliation as a foundation of culture of peace. In J. de Rivera (Ed.), *Handbook of building cultures of peace*. New York, NY: Springer.
- Hayner, P. B. (1999). In pursuit of justice and reconciliation: Contributions of truth telling. In C. Arnsperg (Ed.), *Comparative peace processes in Latin America*. Washington, DC : Woodrow Wilson Center Press.
- Hayner, P. B. (2005). Kebenaran tak terbahasakan: Refleksi pengalaman komisi-komisi kebenaran, kenyataan, dan harapan. Jakarta, Indonesia: Elsam.
- Kleden, I. (1999). Stratifikasi etnis dan diskriminasi. In F. M Parera & T. J. Koekerits (Eds.), *Demokratisasi dan otonomi: Mencegah disintegrasi bangsa*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- Lukman, L. (2008). *Pulau Lombok dalam sejarah: Ditinjau dari aspek budaya*. Jakarta, Indonesia: Depdikbud.
- Muluk, H. (2009). Memory for sale: How groups “distort” their collective memory for reconciliation purposes and building peace. In C. J. Montiel & N. M. Noor (Eds.), *Peace psychology in Asia*. New York, NY: Springer.
- Muluk, H., & Malik, I. (2009). Peace psychology of grassroots reconciliation: Lessons learned from the “Baku Bae” peace movement. In C. J. Montiel & N. M. Noor (Eds.), *Peace psychology in Asia*. New York, NY: Springer.
- Nasikun. (1984). *Sistem sosial Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Rajawali.
- Oxford Dictionary. (1989). 2nd ed., vol. 13. Oxford, UK: Clarendon Press.
- Teitel, R. G. (2004). *Keadilan transisional: Sebuah tinjauan komprehensif*. Jakarta, Indonesia: Elsam.
- Wessells, M. (2009). Community reconciliation and post-conflict reconstruction for peace. In J. de Rivera (Ed.), *Handbook of building cultures of peace*. New York, NY: Springer.